

DAFTAR PUSTAKA

- Anugriani, Rezky Mulya., 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone*. Skripsi Universitas Hasanudin: Makasar
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Edisi Pertama*. BPFE Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Baswir, Revrisond., 2002. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi 3*. BPFE: Yogyakarta
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dewi, Indah mustika. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi Univesitas Diponegoro: Semarang
- Frisdiantara, Christea dan Abdul Halim, 2015. *Pengaruh Kompetensi DPRD tentang anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan APBD dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Asia Pacific Conference Accounting and Finance*
- Ghozali, Imam. 2013. *Apliakasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul dan Syukry Abdullah, 2006. *Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal
- Indonesia corruption watch*. 2016. *Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi* Jakarta: Indonesia
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Juliastuti, Ayu, 2013. *Pengaruh Akumtabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan*

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Negeri Padang

Kariangga, Hendra. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Kawedar, Warsito., Abdul Rohman, & Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Universitas Diponegoro. Semarang

Kurniawan, Viki Hendra., 2012 *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggran, Akuntabilitas Publik, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawsan Keuangan Daerah.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta

Kusumawati, Eny, 2014. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran T erhadap Pengawasn Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar).* Seminar Nasional dan Call For Paper Akuntansi-FEB UMS. ISBN: 978-602-70429-2-6

Manginte, dkk. 2015. *Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadapa Pegawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura).* SNA XVIII

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andy. Yogyakarta

Mayasari, Rosalina Pebrica, 2012. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintah Yang Baik Sebagai Variabel Moderating.* Jenius Vol.2 No.1

Novatiani, R Ait dan Nurmalita Lestari, 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota DPRD Kota Bandung.* Jurnal

Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani, 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu).* Universitas Muhammadiyah Magelang, SNA XII

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Daerah”

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah”
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang “keterbukaan Informasi Publik”
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang “ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”
- Sopannah dan Isa Wahyudi. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas, Oaertisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan Antara Pengetahuan Deawan Tentang Anggran Dengan Pengawsan keuangan Daerah*. Jurnal *Legality* Univesitas Muhammmadiyah Malang: Malang
- Sopannah. 2009. “Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD”. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.
- Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan, 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. Jurnal WRA, Vol.1, No.1
- Wibowo, Arie Sigit., 2012. *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggran, dan Political Culture Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawsan Keuangan Daerah*. Jurnal *Akuntansi & Investasi*. Vol. 13 No.1.pp.44-52
- Yuliusman, 2012. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD (Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi)*. ISSN 0852-8349